



**WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR 188.45-397/2024

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025**

**WALI KOTA BALIKPAPAN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terarah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menyusun Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Kota Balikpapan tahun 2025;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Propemperkada Kota Balikpapan Tahun 2025;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

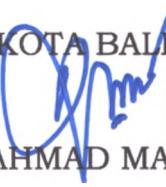
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
**KESATU** : Propemperkada Kota Balikpapan Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam keadaan tertentu, Perangkat Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Kepala Daerah diluar Propemperkada karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Kepala Daerah; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperkada ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 3 September 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,

  
RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 188.45-397/2024**  
**TENTANG**  
**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA**  
**BALIKPAPAN TAHUN 2025**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025**

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
			BARU	PENYEMPURNAAN	
1	TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI	INVESTASI	✓		DPMPTSP
2	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BERIMAN BALIKPAPAN	SUMBER DAYA MANUSIA	✓		RSUD BERIMAN
3	PENGADAAN BARANG DAN JASA RSUD BERIMAN BALIKPAPAN	PENGADAAN BARANG DAN JASA	✓		RSUD BERIMAN
4	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	BLUD		✓	RSUD BERIMAN
5	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026	RENCANA KERJA	✓		BAPPEDA LITBANG
6	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025	RENCANA KERJA	✓		BAPPEDA LITBANG
7	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	RENCANA KERJA		✓	BAPPEDA LITBANG
8	INOVASI DAERAH	INOVASI	✓		BAPPEDA LITBANG
9	TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN	TANGGUNG JAWAB SOSIAL	✓		BAPPEDA LITBANG
10	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	STUNTING	✓		BAPPEDA LITBANG
11	PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	DISABILITAS	✓		BAPPEDA LITBANG
12	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME PENGADAAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH	CADANGAN PANGAN		✓	DP3
13	PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA	SAMPAH	✓		DLH
14	PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA	SAMPAH	✓		DLH
15	TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	INSENTIF DAN DISINSENTIF	✓		DLH

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
			BARU	PENYEMPURNAAN	
16	RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM KOTA BALIKPAPAN	RENCANA AKSI DAERAH	v		DLH
17	PELAKSANAAN GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN	LINGKUNGAN HIDUP	v		DLH
18	POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	BLUD	v		DINKES
19	RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN	KEPEMUDAAN	v		DPOP
20	PELAKSANAAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN	KEPENDUDUKAN	v		DISDUKCAPIL
21	PEDOMAN SITEPLAN	SITEPLAN	v		DISPERKIM
22	PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI	PEDOMAN INVESTIGASI	v		INSPEKTORAT
23	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	TUNJANGAN HARI RAYA	v		BKAD
24	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	APBD		v	BKAD
25	STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	STANDAR SATUAN HARGA	v		BKAD
26	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	APBD	v		BKAD
27	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	APBD	v		BKAD
28	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI	APBD		v	BKAD
29	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KEUANGAN DAERAH	v		BKAD
30	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TIDAK TERDUGA		v	BKAD

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
			BARU	PENYEMPURNAAN	
31	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PENERIMAAN/SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	PAJAK	✓		BPPDRD
32	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	BPHTB	✓		BPPDRD
33	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI	RETRIBUSI	✓		BPPDRD
34	SISTEM KERJA	SISTEM KERJA	✓		BKPSDM
35	HUKUMAN DISIPLIN	HUKUMAN DISIPLIN	✓		BKPSDM
36	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	✓		BKPSDM
37	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH	ORGANISASI DAN TATA KERJA	✓		BAGIAN ORGANISASI
38	PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA	RUKUN TETANGGA	✓		BAGIAN PEMERINTAHAN
39	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM	BANTUAN HUKUM	✓		BAGIAN HUKUM

WALI KOTA BALIKPAPAN,



RAHMAD MAS'UD